

Kepala Diklat

Biro Diklat Pendidikan dan Kebudayaan

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1973

Tentang

Pendidikan, Penegakan, dan Pengarisan tdk

Biro Diklat Pendidikan dan Kebudayaan,

Jenitbang

- v: ① halva berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1973 telah ditetapkan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Nenengh Dalam Tingkat Pertama;
- ② halva untuk memperkuat daya tahan Sekolah Nenengh Dalam Tingkat Pertama (SNP) sejajar dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Publikan, Penegalan, dan Jenitbang SNP;
- ③ ④ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1974;
- ⑤ Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1974, Anggaran Pendekta/taribudayai;
- ⑥ Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1960;
- ⑦ Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1960;
- ⑧ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0430/0/1973;
- ⑨ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0430/0/1973, No.0422/0/1973, No.0474/0/1973, dan No.0113/0/1973;

Diperintahkan : Penetapanan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6-748/1/MENPAB/0/03 tanggal 20 September 1974;

N L A U T U E K A R I

Hulu Lapuk

- Perintah :
- a. Sekolah Sekolah Nenengh Dalam Tingkat Pertama (SNP) Negeri;
  - b. Penegalan Pendidik tdk Negeri dan jadi tdk Negeri;
  - c. Jenitbang tdk Swasta njenengh tdk Negeri;
  - d. beberapa provinsi sebagai tdk terselbat pun dikenal di keputusan ini.

666 -

- 1. Sekretariat Negara,
  - 2. Sekretariat Kabinet,
  - 3. Komisi Yudikatif,
  - 4. Komisi Lencana Negara,
  - 5. Bantuan Kementerian,
  - 6. Komisi Penanaman Miskin,
  - 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 9. Direktur Jenderal dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan padaDepartemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 11. Gubernur Sekretaris Daerah, Bupati, dan Bupati Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 12. Deputi Direkturat, Inspektorat, Direktur, Puslit dan PII dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 13. Bapjan, Bulus dan Parawangi-undangan Departemen Kebudayaan,
  - 14. Dinas Kultur Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
  - 15. Gubernur Wilayah Negeri Tingkat I,
  - 16. Dinas Koordinasi Koordinasi Perwakilan Tinggi Santa,
  - 17. Pusat Univ./Institut Tinggi/Akademisi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
  - 18. Badan Pemerintah Kewenangan,
  - 19. Bapjan, Anggaran,
  - 20. Bapjan, Projek,
  - 21. Bap. Perhimpunan Negara Bapjan, Anggaran Bapertenas Zoniran,
  - 22. Dinas Perpendidikan Negeri,
  - 23. Dinas Ketenagakerjaan Kajagunginan Negara,
  - 24. Dinas Administrasi Negara,
  - 25. Dinas DPKB-NI,
  - 26. Komisi IX DIL-NI,
  - 27. Organisasi-unit yang dipergunakan sebelumnya.

Selain mengisi dengan milisya  
digunakan juga dalam bentuk  
kebutuhan Diperlukan dan  
pendidikan.



(29-5010, 3.1.)

MENGETAHUI  
Kepada SLIP Asuransi Jaminan

~~Dr. SOEKADI~~